

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN Dan BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
- 3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- 6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

APBD tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp1.420.795.680.609 Rp2.203.503.706 bertambah/(berkurang) sebesar sehingga menjadi Rp1.422.999.184.315, dengan rincian sebagai berikut:

Rp.1.350.422.578.012

a. Pendapatan daerah

1. Semula

	- 1 10 1 1 - 1 - 1	
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.26.229.736.070
	Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.1.376.652.314.082
b.	Belanja daerah	
	1. Semula	Rp.1.405.795.680.609
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.2.203.503.706
	Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.1.407.999.184.315

c. Pembiayaan daerah

1. Penerimaan pembiayaan

a) Semu	la			Rp.70.373.102.597
b) Bertai	mbah/(berkura	ang)		Rp.(24.026.232.364)
Jumlah	penerimaan	pembiayaan	setelah	Rp.46.346.870.233
perubaha	an			

2. Pengeluaran pembiayaan

Rp.15.000.000.000 a) Semula b) Bertambah/(berkurang) Rp.(0)Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Rp.15.000.000.000 perubahan Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp.31.346.870.233

Sisa lebih pembiayaan anggaran Rp.0 perubahan

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

	1. Semula	Rp.128.499.880.200
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.(2.510.501.764)
	Jumlah pendapatan asli daerah setelah	
	perubahan	Rp.125.989.378.436
b.	Pendapatan transfer	
	1. Semula	Rp.1.206.922.697.812
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.(851.788.166)
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.1.206.070.909.646
c.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
	4 0 1	D 4 = 000 000 000

1. Semula	Rp.15.000.000.000
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.29.592.026.000
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp.44.592.026.000
setelah nemihahan	rtp. 1 1103210201000

(1)	Pendapatan	asli	daerah	sebagaimana	dimaksud	dalam	Pasal	3	huruf	a,
	bersumber d	lari :								

a.	Pajak	daerah
----	-------	--------

1. Semula	Rp.55.550.000.000
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.(4.950.000.000)
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.50.600.000.000

b. Retribusi daerah

Retificusi daeran	
1. Semula	Rp.2.562.500.000
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.(349.500.000)
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.2.213.000.000

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula Rp.6.450.000.000
2. Bertambah/(berkurang) Rp.764.956.413
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang Rp.7.214.956.413
sah setelah perubahan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula Rp.63.937.380.200
2. Bertambah/(berkurang) Rp.2.024.041.823
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah Rp.65.961.422.023
yang sah setelah perubahan

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Transfer pemerintah pusat

1. Semula	Rp.1.152.684.263.000
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.(14.775.949.087)
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah	Rp.1.137.908.313.913
perubahan	

b. Transfer antardaerah

1. Semu	ıla	Rp.54.238.434.812			
2. Berta	mbah/(berl		Rp.13.924.160.921		
Jumlah	transfer	antardaerah	setelah	Rp.68.162.595.733	
perubahan					

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

Pendapatan hibah

1. Semula	Rp.15.000.000.000
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.29.592.026.000
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.44.592.026.000

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja operasi

b.

1. Semula	Rp.1.068.103.576.890			
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.(23.087.343.756)			
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp.1.045.016.233.134			
Belanja modal				
1 Camula	Pn 157 810 002 063			

 1. Semula
 Rp.157.819.992.963

 2. Bertambah/(berkurang)
 Rp.27.936.487.378

 Jumlah belanja modal setelah perubahan
 Rp.185.756.480.341

- c. Belanja tidak terduga
 - 1. Semula
 Rp.7.393.508.565

 2. Bertambah/(berkurang)
 Rp.(4.274.118.085)

Jumlah belanja tidak terduga setelah

perubahan Rp.3.119.390.571

- d. Belanja transfer
 - 1. Semula Rp.172.478.602.100
 - 2. Bertambah/(berkurang) <u>Rp.1.628.478.169</u>

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp.174.107.080.269

Pasal 6

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai

1. Semula	Rp.747.708.033.676
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. (53.625.412.551)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.694.082.621.125

- b. Belanja barang dan jasa
 - 1. Semula Rp.307.298.714.214
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp.28.644.423.375 Jumlah belanja barang dan jasa setelah Rp.335.943.137.589

perubahan

- c. Belanja hibah

 1. Semula

 2. Bertambah/(berkurang)

 Jumlah belanja hibah setelah perubahan

 Rp.11.668.829.000

 Rp (1.353.554.580)

 Rp.10.335.274.420
- d. Belanja bantuan sosial
 - 1. Semula Rp.1.408.000.000
 - 2. Bertambah/(berkurang) <u>Rp.3.247.200.000</u>

Jumlah belanja bantuan sosial setelah Rp.4.655.200.000 perubahan

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :
 - a. Belanja modal peralatan dan mesin
 - 1. Semula Rp.29.721.218.800
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp.1.337.066.682

 Jumlah belanja modal peralatan dan mesin Rp.31.058.285.482

setelah perubahan

- b. Belanja modal bangunan dan gedung
 - 1. Semula Rp.37.125.173.650
 - 2. Bertambah/(berkurang) <u>Rp.3.554.084.570</u> Jumlah belanja modal bangunan dan Rp.40.679.258.220

gedung setelah perubahan c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

 1. Semula
 Rp.84.252.542.406

 2. Bertambah/(berkurang)
 Rp.26.147.104.459

 Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan
 Rp.110.399.646.865

irigasi setelah perubahan

- d. Belanja modal aset tetap lainnya
 - 1. Semula Rp.6.721.058.107

2. Bertambah/(berkurang) Rp.(3.101.768.333)

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya Rp.3.619.289.774

setelah perubahan

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

1. Semula Rp.7.393.508.656

2. Bertambah/(berkurang) Rp(4.274.118.085)

Jumlah belanja tidak terduga setelah Rp.3.119.390.571 perubahan

- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil

1. Semula Rp.5.811.250.000

2. Bertambah/(berkurang) <u>Rp.1.181.146.669</u>

Jumlah belanja bagi hasil setelah Rp.6.992.396.669 perubahan

b. Belanja bantuan keuangan

1. Semula Rp.166.667.352.100

2. Bertambah/(berkurang) Rp.447.331.500

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Rp.167.114.683.600 perubahan

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan

1. Semula Rp.70.373.102.597

2. Bertambah/(berkurang) <u>Rp.(24.026.232.364)</u>

Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah Rp.46.346.870.233 perubahan

b. Pengeluaran pembiayaan

1. Semula Rp.15.000.000.000

2. Bertambah/(berkurang) Rp.0

Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah Rp.15.000.000.000 perubahan

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, dengan rincian:

a. Semula Rp.70.373.102.597

b. Bertambah/(berkurang) Rp.(24.026.232.364)

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun Rp.46.346.870.233 sebelumnya setelah perubahan

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas penyertaan modal daerah dengan rincian :

a. Semula Rp.15.000.000.000

b. Bertambah/(berkurang) Rp.0

Jumlah penyertaan modal daerah setelah Rp.15.000.000.000 perubahan

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1.	Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut						
		_		Jenis	Pendapatan,	Belanja,	dan	
		Pembiayaan;						

- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
- 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
- 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD;
- 9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- 10. Lampiran X Dafttar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
- 11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- 12. Lampiran XII Daftar Pernyataan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainya;
- 13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain
- 14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselenggarakan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Tahun Anggaran;
- 15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
- 16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman daerah.

Pasal 10

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diatur oleh Peraturan Bupati.

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang Pada tanggal 2 November 2022 BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang Pada tanggal 2 November 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ttd

RUDY REPENALDI RILIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT ($2 \ / \ 87 \ / \ 2022)$

